

Respons Kebijakan Kepala Sekolah terhadap *Decoupling* Akreditasi di Sekolah Dasar Rural

^{1*} Panu Sandi, ² Baiq Indrawati Handayani, ³ Sahrin, ⁴ Baiq Kartini Muliana, ⁵ Basilius Redan Werang

^{1,2,3,4,5} Program Studi Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: fanosandinunu@gmail.com

Received: May 2026; Revised: June 2026; Published: July 2026

Abstrak

Akreditasi sekolah idealnya mendorong pelestarian budaya mutu berkelanjutan, namun realitasnya sering memicu fenomena *decoupling* (formalitas administratif). Penelitian ini bertujuan menganalisis respons kebijakan kepala sekolah terhadap implementasi penjaminan mutu pascaakreditasi dan mengidentifikasi bentuk kesenjangan antara formalitas akreditasi dengan praktik operasional di sekolah dasar rural serta mengeksplorasi faktor-faktor struktural dan kontekstual yang memengaruhinya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif-analitis di SD Negeri X, perbatasan rural Kabupaten Lombok Tengah, penelitian melibatkan 1 kepala sekolah dan 8 guru sebagai informan kunci. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi terstruktur, dan studi dokumentasi selama tiga minggu, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan kontradiksi tajam antara klaim manajerial dan realitas operasional: dokumen penjaminan mutu harian berstatus "Ada, Tidak Mutakhir", konsistensi standar pembelajaran di kelas fluktuatif, dan perbaikan sarana terhambat regulasi Dana BOS yang rigid. Temuan mengonfirmasi mekanisme *organizational decoupling* yang dipicu oleh beban kerja ganda guru, keterbatasan sumber daya, dan kepatuhan simbolik terhadap akreditasi. Studi menyimpulkan bahwa penjaminan mutu di sekolah rural bersifat episodik (*pra-visitasi*) dan memerlukan afirmasi kebijakan berbasis tata kelola adaptif serta diferensiasi instrumen akreditasi.

Kata Kunci: Akreditasi Sekolah, *Decoupling*, Kepala Sekolah, Kualitas Pendidikan, Sekolah Rural.

Principals' Policy Responses to Accreditation Decoupling in Rural Elementary Schools

Abstract

School accreditation ideally catalyzes the institutionalization of a sustainable quality culture; however, in practice, it frequently triggers the phenomenon of *organizational decoupling* (administrative formality). This study aims to analyze principals' policy responses to post-accreditation quality assurance implementation and to identify the gaps between accreditation formalities and operational practices in rural primary schools, as well as to explore structural and contextual factors influencing *decoupling*. Using a qualitative case study design at SD Negeri X on the rural border of Central Lombok Regency, the research involved 1 principal and 8 teachers as key informants. Data were gathered via in-depth interviews, structured observations, and documentation over three weeks, then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana model. Findings reveal sharp contradictions; daily quality documents were "Exist, Not Updated," classroom consistency fluctuated, and facility improvements were hindered by rigid BOS fund regulations. The findings confirm *organizational decoupling* mechanisms triggered by teachers' dual-role burdens, resource constraints, and symbolic compliance with accreditation. The study concludes that quality assurance in rural schools remains episodic (*pre-visitation*) and requires adaptive governance policy affirmation and differentiated accreditation instruments.

Keywords: Accreditation, *Decoupling*, Quality Culture, Rural School, School Principal.

How to Cite: Sandi, P., Handayani, B. I., Sahrin., Muliana, B. K., & Werang, B. R. (2026). Respons Kebijakan Kepala Sekolah terhadap *Decoupling* Akreditasi di Sekolah Dasar Rural. *Journal of Authentic Research*, 5(3), 5840–5849. <https://doi.org/10.36312/jar.v5i3.6315>



<https://doi.org/10.36312/jar.v5i3.6315>

Copyright© 2026, Sandi et al.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Akreditasi sekolah di Indonesia telah bertransformasi dari sekadar pemenuhan administratif menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan (Abdillah et al., 2026). Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (BAN-PDM) menetapkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai tolok ukur penilaian yang harus dipenuhi setiap satuan pendidikan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020) (Mansyuri et al., 2024). Idealnya, proses akreditasi mendorong sekolah untuk menginternalisasi budaya mutu melalui siklus evaluasi diri, perbaikan berkelanjutan, dan akuntabilitas publik (Sani, 2023).

Secara teoretis, tuntutan mutu ini selaras dengan konsep *Total Quality Management* (TQM) dan siklus *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) yang menekankan perbaikan berkelanjutan dalam organisasi pendidikan (Deming, 1986; Sallis, 2014). Akreditasi diharapkan menjadi sarana refleksi sekaligus katalis terbentuknya *quality culture* yang konsisten. Namun, realitas lapangan menunjukkan kesenjangan antara norma ideal dan praktik---formalitas administratif sering lebih menonjol daripada perubahan substantif (Prasojo & Anwar, 2024).

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori neo-institusionalisme, khususnya konsep *organizational decoupling* (Meyer & Rowan, 1977), yakni terpisahnya struktur formal yang ditampilkan sekolah dengan praktik operasional sehari-hari. *Decoupling* terjadi ketika organisasi mengadopsi kebijakan eksternal secara simbolis untuk memperoleh legitimasi, tanpa mengubah rutinitas internal secara fundamental (Boxenbaum & Jonsson, 2017). Penelitian terdahulu banyak berfokus pada instrumen penilaian akreditasi dan kesiapan administratif sekolah (Prasojo & Anwar, 2024; Supriadi et al., 2022), namun masih terbatas kajian yang menyoroti dinamika respons kepala sekolah dan interaksinya dengan beban kerja guru serta konteks rural.

Di sekolah dasar daerah rural atau perbatasan, kompleksitas *decoupling* semakin tinggi karena keterbatasan sumber daya: jumlah guru terbatas, sarana minim, beban administratif berat, dan dukungan sosial-ekonomi masyarakat rendah (Azhari & Nurhafizah, 2023; Baharuddin & Burhan, 2025). Guru di daerah rural menghadapi *dual-role pressure*---mengajar sekaligus mengelola administrasi---yang berpotensi memicu kelelahan kerja (*burnout*) dan menurunkan kualitas pembelajaran (Elvina et al., 2026). Kondisi ini memperkuat urgensi untuk meneliti bagaimana kepala sekolah merespons tuntutan penjaminan mutu pascaakreditasi dalam konteks keterbatasan struktural tersebut.

Berdasarkan celah penelitian (*research gap*) tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis respons kebijakan kepala sekolah dalam mengimplementasikan penjaminan mutu pascaakreditasi di sekolah dasar rural; (2) mengidentifikasi bentuk kesenjangan (*decoupling*) antara formalitas akreditasi dan praktik operasional harian; dan (3) mengeksplorasi faktor-faktor struktural dan kontekstual yang memengaruhi terjadinya *decoupling* di sekolah perbatasan rural.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengeksplorasi secara mendalam dan holistik fenomena kontradiksi penjaminan mutu serta respons kebijakan kepala sekolah dalam konteks spesifik sekolah dasar rural yang kaya akan dinamika lokal (Miles et al., 2020). Desain studi kasus deskriptif-analitis memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menggambarkan fenomena decoupling akreditasi sebagaimana adanya di lapangan, tetapi juga menganalisis secara kritis keterkaitan kausal antara faktor internal, struktural, dan eksternal yang memengaruhinya.

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri X (nama samaran), sebuah sekolah dasar negeri di perbatasan rural Kabupaten Lombok Tengah yang berjarak kurang lebih 23 kilometer dari pusat kota kabupaten dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Timur. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) berdasarkan karakteristik geografis perbatasan yang unik, keterbatasan sumber daya pendukung, serta keterjangkauan aksesibilitas peneliti. Subjek informan kunci terdiri dari 1 orang Kepala Sekolah dan 8 orang guru. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* dengan kriteria bahwa seluruh informan merupakan personel aktif yang memikul tanggung jawab operasional harian dalam pembelajaran sekaligus terlibat langsung dalam pengerjaan administrasi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Jumlah 8 orang guru ini mencakup seluruh populasi pendidik di sekolah tersebut, sehingga dinilai sangat memadai untuk merepresentasikan dinamika internal tata kelola sekolah secara utuh tanpa ada persepsi yang terlewatkan.

Pengumpulan data lapangan dilaksanakan selama tiga minggu, terhitung mulai akhir Mei hingga awal Juni 2026. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama yang dijalankan secara bersamaan:

1. Wawancara Mendalam: Wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dilakukan secara tatap muka kepada Kepala Sekolah dan 8 orang guru menggunakan pedoman wawancara yang berfokus pada dimensi komitmen kepemimpinan, respons kebijakan pascaakreditasi, budaya mutu, dan kendala operasional. Setiap sesi wawancara berlangsung antara 45 hingga 90 menit, direkam atas izin informan, dan ditranskrip secara verbatim untuk analisis lanjutan.
2. Observasi Terstruktur Deskriptif: Dilakukan untuk mengamati interaksi pembelajaran di kelas, kondisi fisik sarana prasarana, serta kedisiplinan pembaruan berkas kelas harian di luar masa penilaian asesor eksternal. Observasi mengacu pada lembar rubrik yang dikembangkan berdasarkan sintesis Kepatuhan Akreditasi BAN-PDM dan indikator Budaya Mutu TQM/SPMI. Instrumen observasi ini mencakup 10 indikator mutu harian (antara lain: komitmen manajerial, pembaruan dokumen harian, kondisi sarpras, keterlibatan guru, dan interaksi kelas). Validitas konstruksi instrumen diuji terlebih dahulu melalui kaji pakar (*expert judgment*) oleh dua orang ahli manajemen pendidikan. Penilaian rubrik menggunakan kategori kualitatif berjenjang (1 = Tidak Konsisten, 2 = Kurang Konsisten, 3 = Cukup Konsisten, 4 = Sangat Konsisten) yang difungsikan bukan sebagai alat ukur kuantitatif inferensial, melainkan sebagai

pemeta kualitatif (*qualitative mapping*) untuk mengidentifikasi tingkat konsistensi operasional harian.

3. Studi Dokumentasi: Peneliti melakukan verifikasi dan keabsahan fisik terhadap berkas autentik sekolah meliputi dokumen RKS/RKAS, notulen rapat dewan guru, buku supervisi, jurnal mengajar kelas, RPP/modul ajar harian, portofolio 8 SNP, serta arsip penilaian siswa periode reguler.

Proses analisis data mengikuti model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2020) yang dilaksanakan secara bertahap meliputi: (a) Kondensasi Data: Mentranskrip hasil wawancara, menyeleksi catatan lapangan, dan melakukan pengodean (*open coding*) untuk memilah data yang relevan dengan pertanyaan penelitian; (b) Penyajian Data: Mengintegrasikan data yang telah dikodekan ke dalam matriks triangulasi dan tabel komparasi kategoris (*axial coding*) untuk memetakan kesenjangan antarinstrumen; serta (c) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi: Merumuskan makna temuan melalui *selective coding* guna mengidentifikasi pola utama *decoupling* dan merumuskan proposisi kualitatif. Pengumpulan data dihentikan ketika telah mencapai *kriteria kejenuhan data (data saturation)*, yaitu ketika pengulangan informasi dari wawancara guru ke-8 dan observasi mingguan ketiga tidak lagi menghasilkan tema atau pola temuan baru yang signifikan.

Uji keabsahan dan keandalan data (*trustworthiness*) dijaga melalui tiga strategi utama:

1. Triangulasi: Mengomparasikan secara silang (*cross-verification*) data lisan wawancara Kepala Sekolah, data perilaku/fisik hasil observasi, dan bukti autentik dokumen cetak.
2. Member Checking: Mengonfirmasi kembali draf transkrip wawancara dan kesimpulan sementara kepada Kepala Sekolah dan perwakilan guru guna memastikan bahwa interpretasi peneliti akurat dan tidak bias.
3. Audit Trail: Menyusun rekam jejak penelitian secara sistematis, mulai dari catatan lapangan mentah, rekaman audio, lembar coding, hingga draf analisis yang diperiksa secara berkala bersama tim peneliti untuk menjamin transparansi metodologis.

Prinsip Etika Penelitian diterapkan secara ketat sepanjang studi berjalan. Peneliti memperoleh persetujuan tertulis/lisani (*informed consent*) dari seluruh partisipan sebelum wawancara dan observasi dimulai, memberikan jaminan anonimitas dengan menyamarkan identitas sekolah menjadi "SD Negeri X" serta meniadakan nama pribadi informan, menjaga kerahasiaan dokumen internal sekolah, dan memastikan bahwa proses pengumpulan data tidak mengganggu jam belajar-mengajar efektif di sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komitmen Manajerial dan Realitas Pengarsipan Dokumen Mutu Harian

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Sekolah memaparkan bahwa sekolah telah menetapkan kebijakan pembagian tugas kelompok kerja (*pokja*) penjaminan mutu yang mengampu 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pihak manajemen sekolah merancang mekanisme agar setiap kegiatan yang dilaksanakan di sekolah

langsung diikuti oleh penyusunan dan penataan berkas fisik. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sekolah sebagai berikut:

"Kami sudah merancang pembagian tugas penjaminan mutu di antara para guru. Harapannya setiap selesai kegiatan, dokumen manual langsung disusun dan dirapikan agar mutu tetap terjaga dan terintegrasi dengan instrumen pemerintah..." (Wawancara KS, Mei 2026).

Namun, temuan observasi terstruktur di luar masa visitasi menunjukkan bahwa aktivitas pembaruan berkas administrasi cetak tidak berlangsung secara harian. Pengarsipan dokumen fisik cenderung pasif dan baru diperbarui ketika ada instruksi pemeriksaan. Studi dokumentasi terhadap portofolio 8 SNP mengonfirmasi bahwa seluruh bundel dokumen secara fisik berstatus "Ada", namun mayoritas berkas berada pada kondisi "Tidak Mutakhir". Berkas-berkas administrasi reguler seperti jurnal mengajar, RPP/modul ajar harian, serta rekapitulasi evaluasi pembelajaran banyak ditemukan dalam format cetak yang belum terisi lengkap.

Eskalasi penyusunan dokumen fisik tercatat mengalami lonjakan signifikan menjelang kedatangan tim asesor akreditasi. Kepala Sekolah mengonfirmasi dinamika pengerjaan dokumen pada periode pra-visitasi tersebut:

"Kalau mau jujur, saat menjelang visitasi memang kami melakukan 'super persiapan'. Kami mengadakan apa yang sebelumnya belum ada agar penilaian resmi sekolah tidak merosot..." (Wawancara KS, Mei 2026).

Temuan ini mengonfirmasi mekanisme *symbolic compliance* (Meyer & Rowan, 1977), di mana sekolah membangun panggung kepatuhan administratif untuk merespons tekanan eksternal, sementara rutinitas internal berjalan pragmatis sesuai daya dukung yang ada (Boxenbaum & Jonsson, 2017). Pola ini mencerminkan apa yang disebut Supriadi et al. (2022) sebagai *formal conformity*---penyesuaian formalitas untuk mengamankan peringkat akreditasi dan alokasi dana, tanpa disertai internalisasi budaya mutu. Kontradiksi antara klaim manajerial dan realitas dokumen ini menunjukkan bahwa kepatuhan simbolik menjadi strategi organisasi untuk memenuhi tuntutan eksternal tanpa mengubah rutinitas harian secara substansial.

Pelaksanaan Pembelajaran dan Beban Administrasi Pendidik

Dalam dimensi pelaksanaan proses pembelajaran, Kepala Sekolah menyatakan telah menjalankan fungsi pembinaan dan supervisi kelas secara berkala untuk memastikan ketaatan guru terhadap standar proses. Dalam penuturan lisan, seluruh guru diarahkan untuk menyelaraskan perencanaan pembelajaran cetak dengan praktik di kelas.

Hasil observasi harian terhadap proses belajar-mengajar di kelas menunjukkan tingkat pelaksanaan yang bervariasi. Guru konsisten hadir dan melaksanakan interaksi mengajar dengan siswa di kelas, namun keterikatan pada dokumen RPP/modul ajar cetak tidak berlangsung seragam setiap hari. Dokumen jurnal kelas harian tidak selalu diisi seketika setelah jam pelajaran usai.

Melalui wawancara dengan informan guru, terungkap bahwa keterbatasan jumlah personel – yakni 8 orang guru untuk mengampu seluruh rombongan belajar – menyebabkan para pendidik memikul beban ganda (*dual-role*), yaitu menjalankan tugas mengajar sekaligus mengelola bundel dokumen 8 SNP secara manual. Salah seorang guru menguraikan kondisi operasional yang dialami:

"Beban mengajar di kelas saja sudah menguras energi. Jika setiap hari kami juga diwajibkan meng-update puluhan format administrasi akreditasi cetak secara manual, kami kelelahan. Akhirnya dokumen baru kami kejar saat ada instruksi atau pemeriksaan resmi." (Wawancara Guru, Mei 2026).

Kondisi ini menguatkan teori kelelahan emosional Freudenberger (1974) dan temuan Elvina et al. (2026) tentang hubungan beban administratif dengan *burnout*. Dengan rasio 8 guru untuk seluruh rombongan belajar, *dual-role pressure* menjadi tidak terhindarkan. Guru secara rasional memprioritaskan kehadiran mengajar di kelas dan mengabaikan pengisian dokumen harian, kemudian menutupi keteringgalan secara mendadak saat inspeksi tiba. Perbedaan antara klaim supervisi berkala dan realitas fluktuatif di kelas mengindikasikan bahwa pengawasan internal belum mampu menjembatani kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan.

Perencanaan Perbaikan Sarana dan Realisasi Anggaran Sekolah

Pada dimensi sarana dan prasarana, Kepala Sekolah mengutarakan bahwa rekomendasi hasil akreditasi sebelumnya telah diakomodasi ke dalam dokumen Rencana Kerja Sekolah (RKS) serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Perencanaan perbaikan difokuskan pada perawatan fasilitas kelas dan penyediaan sarana penunjang pembelajaran.

Hasil observasi fisik lingkungan sekolah mencatat bahwa pemeliharaan sarana harian berjalan terbatas. Fasilitas penunjang seperti komputer dan proyektor tidak dimanfaatkan secara rutin dalam kegiatan belajar-mengajar harian akibat keterbatasan jumlah unit yang berfungsi baik. Studi dokumentasi terhadap laporan realisasi anggaran mengindikasikan bahwa beberapa alokasi pemeliharaan sarana yang telah tercantum dalam RKAS tidak dapat direalisasikan secara penuh.

Wawancara dengan Kepala Sekolah mengungkapkan bahwa fleksibilitas eksekusi anggaran terhambat oleh ketatnya regulasi penggunaan Dana BOS. Di sisi lain, sekolah yang berlokasi di perbatasan rural ini tidak memobilisasi dana swadaya dari komite sekolah maupun masyarakat sekitar.

Matriks Triangulasi Data Lapangan

Untuk menyajikan gambaran silang antarsumber data secara sistematis, perbandingan antara hasil wawancara, observasi lapangan, dan verifikasi dokumen disajikan pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Matriks Perbandingan Data Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi

Komponen Mutu	Hasil Wawancara (Klaim Manajerial)	Temuan Observasi Lapangan	Bukti Dokumentasi	Studi Fisik
Pengarsipan Dokumen SNP	8 Kebijakan pembagian tugas pokok jabatan ditetapkan; berkas manual dirapikan setiap selesai kegiatan.	Pembaruan berkas harian pembenahan dokumen menjelang visitasi.	Dokumen berstatus <i>Ada, Mutakhir</i> . Banyak format kosong di luar periode re-akreditasi.	SNP <i>Tidak</i> . Banyak format
Praktik Pembelajaran & Administrasi Kelas	Supervisi kelas dilaksanakan berkala; guru mengajar sesuai standar proses.	Kegiatan mengajar berlangsung aktif, namun keterikatan pada RPP cetak fluktuatif.	Jurnal kelas dan harian cetak tidak terisi secara tertib dan tidak merata.	RPP

Pemeliharaan Sarana & Prasarana	Rekomendasi akreditasi diintegrasikan ke dalam RKS dan anggaran RKAS.	Perawatan sarana harian terbatas; pemanfaatan media penunjang belum konsisten.	Berkas realisasi anggaran menunjukkan beberapa program perbaikan sarpras terealisasi parsial.
Kegiatan Koordinasi & Pembinaan	Rapat dewan guru dan peningkatan kompetensi dijalankan secara rutin.	Guru berkoordinasi secara informal dalam menjalankan tugas harian.	Notulen rapat dewan guru dan sertifikat pelatihan tersip secara lengkap dan mutakhir.

Temuan empiris dalam penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan (*gap*) yang kontras antara klaim formalibilitas administrasi dengan realitas operasional harian di SD Negeri X. Ketidaksiesuaian ini tidak boleh hanya dipandang sebagai kegagalan teknis individu pendidik atau penyimpangan manajerial semata, melainkan merupakan wujud dari mekanisme kepatuhan simbolik (*symbolic compliance*) atau keterpisahan institusional (*decoupling*) yang terstruktur (Meyer & Rowan, 1977; Boxenbaum & Jonsson, 2017).

Mekanisme Decoupling dan Perilaku Kepatuhan Simbolik

Kesenjangan antara lonjakan persiapan dokumen menjelang visitasi dan pasifnya pengarsipan berkas di hari-hari reguler mengonfirmasi bahwa penjaminan mutu melalui sistem akreditasi masih diperlakukan sebagai instrumen legitimasi eksternal, bukan sebagai budaya mutu (*quality culture*) yang terinternalisasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Supriadi et al. (2022) yang mengidentifikasi bahwa sekolah dasar sering kali menampilkan penyesuaian formalitas (*formal conformity*) guna mengamankan peringkat akreditasi dan alokasi dana pemerintah.

Namun, berbeda dengan temuan Supriadi et al. (2022) yang menyoroti kurangnya komitmen kepemimpinan sebagai penyebab utama, studi ini menemukan bahwa kepatuhan yang bersifat episodik ini dipicu oleh strategi organisasi yang kepemimpinan yang diterapkan. Sekolah secara sadar memisahkan struktur formal yang dipersyaratkan oleh badan akreditasi eksternal (seperti BAN-PDM) dari aktivitas rutin pembelajaran di kelas.

Proses keterpisahan ini bekerja melalui mekanisme dualisme fungsi organisasi, di mana sekolah secara reaktif membangun panggung kepatuhan simbolik untuk merespons puncaknya tekanan akreditasi eksternal melalui pemenuhan dokumen administrasi secara masif. Sebaliknya, dalam dinamika internal harian, kehidupan sehari-hari sekolah kembali berorientasi pada pemenuhan kebutuhan operasional yang pragmatis dan realistis sesuai dengan batas ketersediaan daya dukung yang ada (Boxenbaum & Jonsson, 2017). Dualisme ini menguraikan secara utuh bahwa *organizational decoupling* di sekolah dasar rural perbatasan bukan merupakan bentuk penolakan atas standar mutu, melainkan wujud kompromi adaptif agar fungsi utama pembelajaran di kelas tetap dapat berjalan di tengah himpitan kerumitan birokrasi dan kelangkaan sumber daya.

Kerentanan Konteks Rural/Perbatasan dan Teacher Burnout

Konteks geografis dan sosio-struktural wilayah perbatasan rural menjadikan pola *decoupling* ini jauh lebih masif dan tidak terhindarkan dibandingkan dengan

sekolah-sekolah di wilayah perkotaan. Penelitian terdahulu oleh Rahiman et al. (2020) mengenai penjaminan mutu di sekolah perkotaan menunjukkan bahwa beban administrasi dapat ditanggulangi melalui pembagian kerja terspesialisasi (*specialized labor*) dan integrasi sistem informasi digital berbasis *cloud*.

Sebaliknya, kondisi di SD Negeri X memperlihatkan ketimpangan struktural: 8 orang guru harus mengampu seluruh rombongan belajar sekaligus mengelola portofolio manual 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Ketiadaan staf administrasi khusus (*tenaga kependidikan*) menciptakan beban kerja ganda (*dual-role pressure*). Ketika guru dihadapkan pada dikotomi antara mempersiapkan materi mengajar yang interaktif atau mengintegrasikan puluhan format penilaian akreditasi cetak, mereka mengalami kelelahan mental dan fisik (*burnout*). Hubungan langsung antara beban kerja administrasi berlebih dan penurunan kualitas pembelajaran ini menguatkan teori kelelahan emosional Freudenberg (1974). Guru secara rasional memilih untuk memprioritaskan kehadiran mengajar secara fisik di kelas dan mengabaikan pengisian dokumen harian, lalu menutupi keteringgalan administrasi tersebut secara mendadak saat inspeksi tiba.

Rigiditas Kebijakan BOS dan Penjepitan Regulasi (Policy Straitjacket)

Analisis terhadap dimensi sarana-prasarana memperlihatkan bagaimana struktur kebijakan makro membatasi fleksibilitas mikromanajemen sekolah. Meskipun rekomendasi akreditasi telah diterjemahkan secara formal ke dalam dokumen Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan RKAS, eksekusi riilnya terbentur oleh rigiditas juknis penggunaan Dana BOS.

Penelitian oleh Fitriani & Kurniawan (2021) mengargumenkan bahwa ketidakmampuan sekolah merespons hasil akreditasi disebabkan oleh rendahnya literasi perencanaan Kepala Sekolah. Namun, temuan dalam studi ini membantah tesis tersebut. Kepala Sekolah SD Negeri X memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebutuhan perbaikan sarana, namun terjerat oleh aturan rigiditas BOS yang mengancam penalti administratif jika anggaran dialokasikan di luar petunjuk teknis baku. Ketiadaan dana swadaya dari komite sekolah—yang logis mengingat kondisi sosio-ekonomi masyarakat perbatasan yang terbatas—membuat sekolah berada dalam jebakan isolasi anggaran. Akibatnya, dokumen perencanaan mutu tetap menjadi dokumen di atas kertas (*paper-compliance*) yang tidak merefleksikan perbaikan fasilitas fisik harian.

Implikasi Teoretis dan Kontribusi Praktis Kontribusi Teoretis

Studi ini memperkaya **Teori Neo-Institusionalisme** dalam manajemen pendidikan dengan menghadirkan model "*Resource-Constrained Decoupling*" (Keterpisahan Akibat Keterbatasan Sumber Daya). Model ini menjelaskan bahwa *decoupling* di daerah perbatasan/rural tidak selalu bersumber dari penolakan atau kecurangan (*resistance/gaming*), melainkan merupakan mekanisme adaptasi rasional (*rational adaptation mechanism*) ketika standar mutu yang seragam (*one-size-fits-all policy*) dipaksakan pada ekosistem sekolah yang mengalami kelangkaan daya dukung.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa respons kebijakan kepala sekolah di SD Negeri X bersifat simbolis-episodik, ditandai dengan intensifikasi administratif menjelang visitasi dan kelambanan pengarsipan di luar masa asesmen, yang mencerminkan tiga bentuk kesenjangan (*decoupling*), yaitu ketidaksesuaian antara klaim manajerial dengan realitas dokumen, fluktuasi konsistensi pembelajaran, dan ketidakselarasan perencanaan sarana dengan realisasi anggaran. Faktor struktural pemicu utamanya adalah beban kerja ganda guru yang memicu kelelahan (*burnout*), rigiditas regulasi Dana BOS, serta rendahnya partisipasi masyarakat perbatasan. Secara teoretis, temuan ini mengonfirmasi model *Resource-Constrained Decoupling* sebagai bentuk adaptasi rasional sekolah rural terhadap standar mutu seragam, yang berimplikasi bahwa akreditasi di konteks ini belum menjadi pendorong budaya mutu berkelanjutan, melainkan sekadar instrumen legitimasi eksternal yang bersifat musiman.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan, rekomendasi penelitian ini diarahkan kepada berbagai pemangku kepentingan, antara lain kepala sekolah agar mengintegrasikan pembaruan administrasi ke dalam jadwal rutin dan menginisiasi sistem dokumentasi digital sederhana, serta pengawas sekolah agar mengalihkan fokus supervisi dari pemeriksaan kertas ke pendampingan klinis dan penyederhanaan pelaporan harian (*lean documentation*). Dinas pendidikan disarankan menyediakan tenaga administrasi khusus bagi sekolah rural, memberikan diskresi regulasi Dana BOS yang lebih fleksibel, dan menyelenggarakan pelatihan manajemen beban kerja secara berkala. Sementara itu, BAN-PDM dan Kemendikdasmen direkomendasikan mengembangkan instrumen akreditasi terdiferensiasi (*differentiated accreditation*) berdasarkan ketersediaan sumber daya, sedangkan peneliti selanjutnya disarankan memperluas cakupan studi dengan pendekatan campuran atau komparatif multi-situs untuk menguji validitas model *Resource-Constrained Decoupling* secara lebih luas.

REFERENSI

- Abdillah, M., Husnah, K. S. U., Yaqin, H., & Mizan, H. (2026). KEBIJAKAN, PRINSIP-PRINSIP AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH, DAN PERAN SATUAN PENDIDIKAN DALAM PROSES AKREDITASI. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 3(6), 128-135. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v3i6.2090>
- Azhari, B., & Nurhafizah, N. (2023). Tantangan dan strategi peningkatan mutu pendidikan di daerah pedesaan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(2), 115–128.
- Baharuddin, & Burhan. (2025). Urban and rural teacher perspectives on Indonesian educational reform: Challenges and policy implications. *Cogent Education*, 12(1), Article 2497142. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2497142>
- Boxenbaum, E., & Jonsson, S. (2017). Isomorphism, diffusion and decoupling: Concept evolution and theoretical challenges. In R. Greenwood, C. Oliver, T. B.

- Lawrence, & R. E. Meyer (Eds.), *The SAGE handbook of organizational institutionalism* (2nd ed., pp. 79–104). SAGE Publications.
- Deming, W. E. (1986). *Out of the crisis*. MIT Press.
- Elvina, N., Rahmatika, W. C., & Dewi, N. F. K. (2026). Teacher administrative burden on burnout tendencies for early childhood teachers. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 11(1), 110–115. <https://doi.org/10.36312/jupe.v11i1.2612>
- Fitriani, A., & Kurniawan, D. (2021). Implementasi akreditasi sekolah dasar di daerah terpencil. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 14(1), 45–58.
- Freudenberger, H. J. (1974). Staff burn-out. *Journal of Social Issues*, 30(1), 159–165. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1974.tb00706.x>
- Mansyuri, A., Silfiyah, L., Utami, D. A., & Fadhlullah, A. (2024). Strategi Komunikasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (BAN PDM) Provinsi Jawa Timur dalam Sosialisasi Standar Akreditasi PAUD. *Jurnal Kependidikan Islam*, 14(1), 92–103. <https://doi.org/10.15642/jkpi.2024.14.1.92-103>
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363. <https://doi.org/10.1086/226550>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan. (2020). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Prasojo, L. D., & Anwar, K. (2024). Analisis dampak akreditasi sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 21(1), 32–45.
- Rahiman, H. U., Kodikal, R., & Krishnan, S. (2020). Quality assurance in urban schools: A case study of best practices. *International Journal of Educational Management*, 34(5), 891–906. <https://doi.org/10.1108/IJEM-08-2019-0289>
- Sallis, E. (2014). *Total quality management in education* (3rd ed.). Routledge.
- Sani, R. A. (2023). *Manajemen mutu terpadu di sekolah: Konsep dan aplikasi*. Literasi Nusantara.
- Saukah, A., & Waseso, M. G. (Eds.). (2002). *Menulis artikel untuk jurnal ilmiah* (edisi ke-4, cetakan ke-1). UM Press.
- Supriadi, D., Riyadi, S., & Mulyani, S. (2022). Formal conformity in school accreditation: A study of elementary schools in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 11(3), 401–412.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.